

pada produk-produk hutan non-kayu. Hal ini menunjukkan, partisipasi perempuan dalam menciptakan sumber-sumber alternatif sebagai upaya ketahanan pangan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Namun karena adanya pandangan masyarakat yang masih menempatkan posisi perempuan di ranah domestik, sebagai penyedia sumber pangan keluarga, mengakibatkan peran perempuan dalam upaya ketahanan pangan dilihat sebagai kewajiban dan tidak diapresiasi sebagai bentuk partisipasi perempuan. Pada Diagram 3. dan Diagram 4. juga menunjukkan bahwa upaya inisiasi dalam resolusi konflik masih banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat laki-laki. Namun demikian, ketika konflik telah menemui

Penelitian ini hasil kerjasama Women Research Institute dan World Resources Institute.

titik jenuh dan tidak kunjung mencapai resolusi, maka kelompok perempuan lebih sering maju dan tampil dengan upaya penyelesaian yang khas dilakukan oleh perempuan. Sayangnya, beberapa data yang mendokumentasikan mengenai konflik atau sengketa sosial masih belum banyak yang disusun terpilah secara gender. Padahal, adanya data konflik yang terpilah secara gender menjadi hal yang penting agar tahapan resolusi yang dilakukan dapat lebih efektif dan tepat menasar pada semua pihak yang terlibat dalam konflik.

#### Catatan Akhir

<sup>1</sup> Hasil temuan World Resource Institute: <http://www.wri.org/blog/2014/03/fires-indonesia-spike-highest-levels-june-2013-haze-emergency>.

<sup>2</sup> Harvard Tools adalah alat yang berguna untuk pengumpulan data, memahami peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, dan memperhitungkan tekanan eksternal yang mengembangkan perencanaan. Harvard tools juga merupakan alat yang fleksibel yang dapat digunakan pada berbagai tingkat perencanaan dan analisis, serta dapat diperluas untuk memilah berdasarkan budaya, etnis dan faktor ekonomi, jenis kelamin serta usia. (lihat: Williams, Suzanne; Janet Seed; and Adelina Mwau. (1994). *The Oxfam Gender Training Manual*. United Kingdom & Ireland: Oxfam. Pg: 267).



doc. Riau Women Working Group

## Partisipasi Perempuan dalam Resolusi Konflik Konsesi Hutan

Women Research Institute melakukan penelitian tentang partisipasi perempuan dalam konsesi hutan, yang memetakan faktor pemicu terjadinya konflik sosial dalam pengelolaan sumber daya di daerah konsesi hutan. Persoalan yang menjadi perhatian dalam penelitian tersebut adalah; kronologi konflik, keterlibatan perempuan dalam upaya penyelesaian konflik. Penelitian ini dilakukan karena terbatasnya data tentang resolusi konflik yang disusun terpilah berdasarkan gender. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak dan Pelalawan, Provinsi Riau. Kabupaten Siak dan Pelalawan, merupakan dua dari empat kabupaten yang menyumbangkan 52% dari total peringatan titik api di Indonesia pada tahun 2014.<sup>1</sup> Titik api yang ada di dua kabupaten ini disebabkan oleh pembakaran untuk kepentingan pembukaan lahan oleh berbagai pihak dengan alasan yang berbeda. Tuding menuding siapa penyebab kebakaran kerap terjadi

antara perusahaan dan masyarakat yang berujung konflik.

Setidaknya ada delapan konflik yang berhasil diidentifikasi Kabupaten Siak dan Pelalawan seperti pada Diagram 1. dan data konflik ini dikelompokkan menjadi beberapa isu yakni isu lahan, isu ketahanan pangan, dan isu kesehatan lingkungan seperti yang terlihat pada Diagram 2. Dari delapan konflik yang berhasil diidentifikasi, konflik yang dipicu oleh sengketa lahan lebih sering terjadi. Konflik seperti ini terjadi karena makin berkurangnya lahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kehidupan mereka dan masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses tata kelola hutan. Dalam resolusi konflik lahan penggerak resolusi konflik lebih banyak diupayakan oleh laki-laki dengan cara melakukan aksi demonstrasi atau melakukan negosiasi dengan

Diagram 1.  
Data Konflik Berdasarkan Lokasi

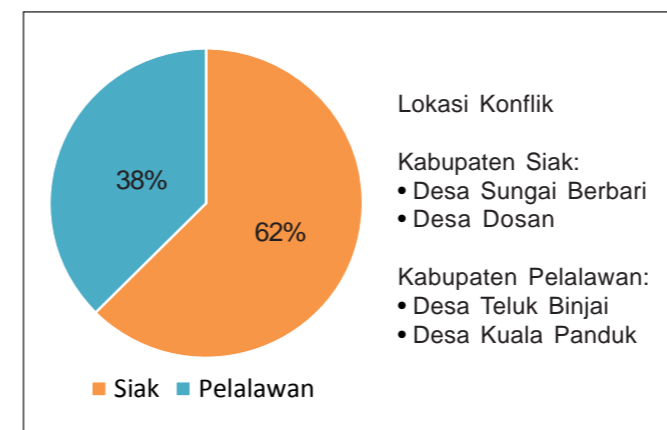
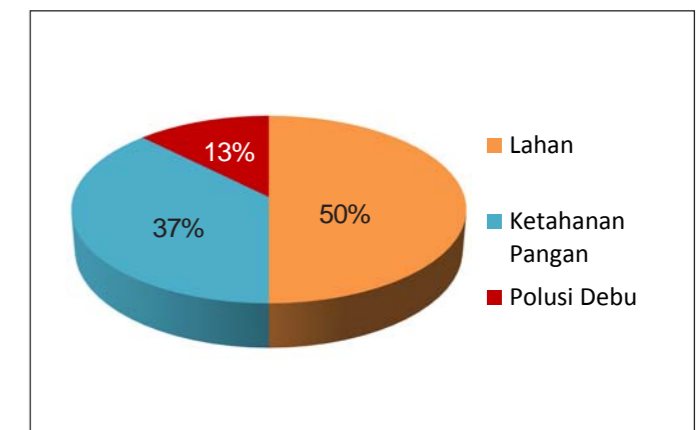


Diagram 2.  
Data Konflik Berdasarkan Masalah



Meskipun peran perempuan dalam resolusi konflik seringkali tidak terlihat, namun penelitian Women Research Institute menunjukkan posisi perempuan berada pada barisan terdepan saat upaya resolusi konflik menemui jalan buntu.

tentang Penanganan Konflik Sosial. Peraturan ini memandatkan bahwa selain melibatkan masyarakat umum, diwajibkan adanya keterlibatan perempuan minimal 30% dalam keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik. Hal ini dapat disikapi sebagai peluang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam resolusi konflik. Ironinya, partisipasi perempuan cenderung tidak terlihat karena dilakukan secara informal oleh mereka. Upaya resolusi konflik oleh perempuan di dua desa penelitian lebih sering terlibat dalam isu kesehatan lingkungan (polusi udara) dan ketahanan pangan. Tidak jarang aksi informal mereka menjadi penggerak terjadinya upaya resolusi konflik.

Salah satu contoh upaya informal yang dilakukan oleh perempuan dalam hal resolusi konflik untuk isu kesehatan lingkungan seperti yang terjadi di Desa Sungai Berbari. Kelompok perempuan, melakukan pemblokiran jalan di jalur-jalur yang biasanya dilewati kendaraan-kendaraan perusahaan. Dengan bantuan masyarakat setempat, mereka menutup jalan dengan batang-batang kayu yang besar. Mereka

perusahaan atau pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa lahan dikontrol oleh laki-laki, lebih lanjut, dari dua diagram hasil identifikasi Akses dan Kontrol Masyarakat terhadap Sumber Daya dan Manfaat,<sup>2</sup> kita juga melihat bahwa laki-laki lebih memiliki akses untuk berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan yang ada, termasuk saat pertemuan upaya resolusi konflik lahan.

Padahal, partisipasi perempuan dalam penanganan konflik sosial, termasuk konflik dalam konsesi hutan, telah tertuang dalam Peraturan Nomor 37 Tahun 2012

Diagram 3.

Profil Akses dan Kontrol Masyarakat terhadap Sumber Daya dan Manfaat di Desa Dosan & Desa Sungai Berbari

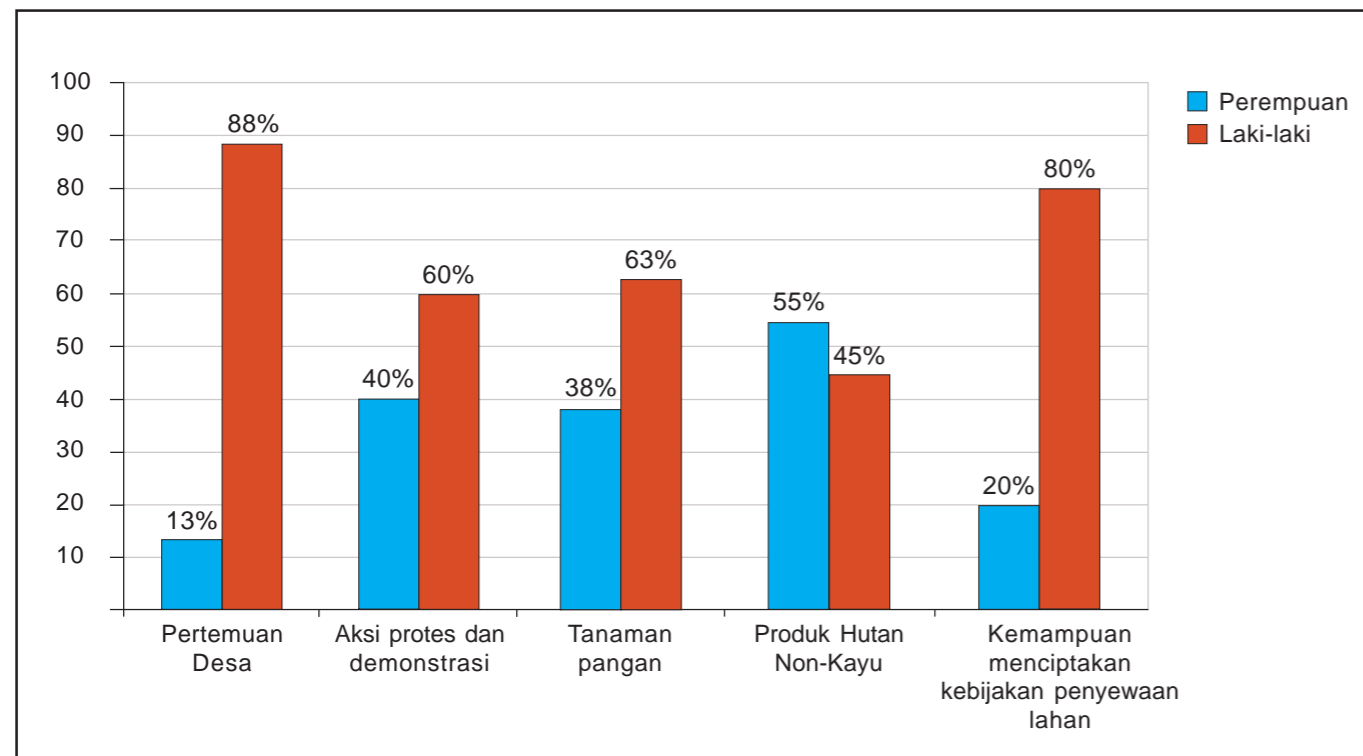
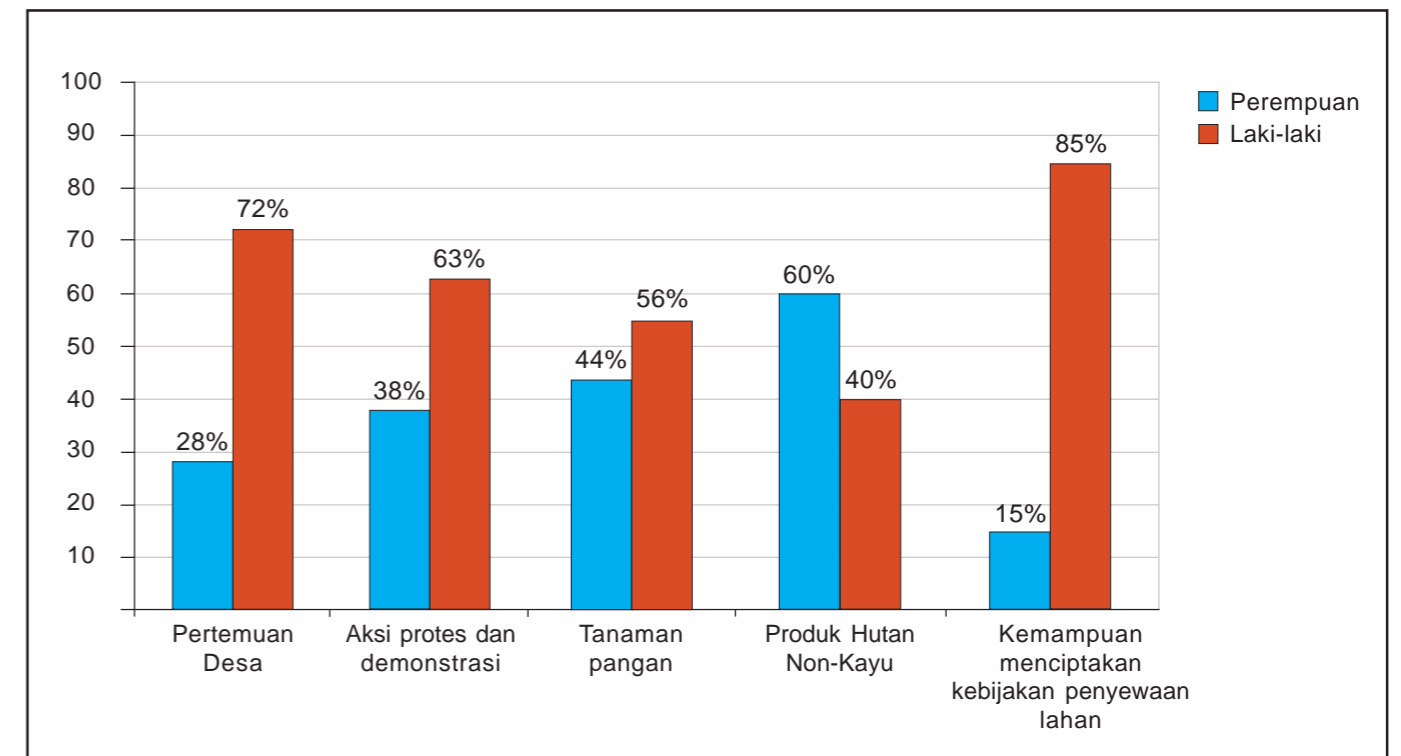


Diagram 4.

Profil Akses dan Kontrol Masyarakat terhadap Sumber Daya dan Manfaat di Desa Teluk Binjai



mengingatkan perusahaan-perusahaan akan kesepakatan yang telah diambil untuk menyirami jalan desa guna mengurangi kepulan debu yang menyebabkan gangguan pernafasan hingga terjadinya Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Cara tersebut terbukti mampu menggerakkan perusahaan untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

Sebaliknya, upaya resolusi konflik dalam isu ketahanan pangan seringkali menemui jalan buntu alias tidak ada tanggapan berarti dari pihak terkait, sementara ketersediaan lahan di desa kian menyempit. Namun demikian, perempuan terlihat tetap berupaya mencari alternatif terhadap ketersediaan pemenuhan sumber pangan keluarga. Pada Diagram 3. dan Diagram 4. terlihat bahwa peran perempuan lebih menonjol dibandingkan dengan laki-laki dalam akses dan kontrol



Pandangan masyarakat yang masih menempatkan posisi perempuan di ranah domestik, sebagai penyedia sumber pangan keluarga, mengakibatkan peran perempuan dalam upaya ketahanan pangan dilihat sebagai kewajaran dan tidak diapresiasi sebagai bentuk partisipasi perempuan.